



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019
Pemerintah Kabupaten Seluma Kembali Raih WDP

Bengkulu – Humas BPK

Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019. Hal tersebut berarti selama dua belas tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Seluma belum pernah sekalipun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2019 tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Novi Eriyan Andesca dan Wakil Bupati Seluma, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jumat, 26 Juni 2020.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2019 dengan opini WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN (WDP)”, jelas Andri Yogama.

Kepala Perwakilan menyebutkan selama pemeriksaan, BPK menemukan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma sehingga menjadi bahan pengecualian, yaitu pada akun Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Berdasar hasil pemeriksaan, ditemukan sembilan permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern, antara lain Pengelolaan Belanja Hibah Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BOS Belum Memadai, Penyajian Piutang PBB dalam LKPD TA 2019 Belum Didukung Data yang Andal, dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai.

Sedangkan temuan terkait ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan ada tujuh, antara lain Kelebihan Pembayaran Tunjangan Jabatan dan TPP; Belanja Perjalanan Dinas Terindikasi Tidak Sesuai Senyatanya; Belanja Jasa Konsultansi Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Personil dalam Pekerjaan Pengawasan; Atas Beberapa Paket Pekerjaan terdapat Kekurangan Volume, Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak, dan Pekerjaan Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan; dan Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran serta Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Perluasan Gedung Tidak Memadai dan Tidak Sesuai Kontrak.

Menutup sambutannya, Kepala Perwakilan meminta kepada Bupati Seluma dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan juga menyinggung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. Berdasarkan data di BPK, sampai dengan Semester II TA 2019 persentase penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Seluma hanya mencapai 49,38% atau terendah di wilayah Bengkulu. Untuk itu Kepala Perwakilan meminta supaya Bupati Seluma untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kepada DPRD untuk terus mendorong upaya percepatan tindak lanjut.

“BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”, tutup Kepala Perwakilan mengakhiri sambutannya. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu